Komunikasi Politik di *lapau-lapau* Nagari Simabur

(Kecamatan Pariangan kabupaten Tanah Datar)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Oleh :

RESKI
03193050

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

ABSTRAK

Reski. Skripsi S1. Komunikasi Politik di *Lapau-lapau* Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. 96 Hal, 19 Buku, 3 Skripsi, dan 1 Artikel Internet.

Komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga terspesialisasi seperti partai politik, media massa, badan-badan informasi pemerintah serta lembaga formal lainnya. Namun, pada masyarakat Minangkabau adanya fenomena komunikasi politik yang terjadi di lapau-lapau yang merupakan lembaga non formal. Sehingga lapau meupakan salah satu sarana komunikasi politik. Komunikasi politik di lapau merupakan gambaran politik real (nyata) masyakat pada tingkat bawah. Komunikasi politik yang dilakukan oleh lembaga formal dan non fomal tersebut mempunyai bentuk dan pesan-politik yang akan disampaikan kepada komunikannya dalam mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang komunikasi politik yang terjadi di lapau-lapau nagari Simabur.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti memakai proses triangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian yang di dapat menunjukkan bentuk komunikasi politik yang terjadi di *lapau-lapau* nagari Simabur adalah: *Pertama*, komunikasi politik kontak langsung yakni dilakukan dengan tatap muka. *Kedua*, komunikasi tidak langsung yang menggunakan media yaitunya: (1). Media Televisi. (2). Media cetak. Dimana kedua media tersebut merupakan sumber infomasi politik bagi masyarakat dalam melakukan komunikasi politik di lapau. Sedangkan pesan politik yang disampaikan kepada komunikan berhubungan dengan pola-pola komunikasi politik yang terjadi di lapau-lapau nagari Simabur yaitu pola komunikasi politik dua arah (elit kepada masyarakat atau sebaliknya).

Komunikasi di lapau yang tidak terorganisir agar dijadikan komunikasi politik yang bermanfaat sebagai sarana sosialisasi politik pada masyarakat tingkat bawah.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi dalam sistem politik yang amat penting. Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik dan pada waktu yang sama ia juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau out put sistem politik itu. Melalui komunikasi politik pula rakyat mengetahui apakah dukungan, aspirasi, dan pengawasan itu tersalur atau tidak sebagaimana dapat mereka simpulkan dari berbagai kebijakan politik yang diambil. Semakin sehat dan semakin tinggi kualitas komunikasi politik yang hadir dalam suatu sistem politik memberi petunjuk bahwa sifat dan kualitas demokrasi sistem politik itu juga semakin sehat dan tinggi.

Dalam kajian komunikasi politik, salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi politik adalah rezim yang berkuasa. Pada masa rezim Orde Baru kekuasaan politik adalah berpusat pada presiden. Oleh karena itu pada masa rezim Orde Baru seluruh proses komunikasi politik tergantung pada satu tangan. Badan legislatif tidak lagi berfungsi sebagai suara rakyat melainkan mendukung presiden. Kritik yang terlalu keras dilontarkan sebagai anggota DPR/MPR akan berakhir dengan pemberhentian tidak hormat hal ini

berdampak pada masyarakat yang tidak bisa mengeluarkan aspirasi mereka dan mengkritik pemerintah. Pada masa inilah terjadinya monopoli komunikasi politik. Terjadinya pengawasan terhadap komunikasi politik, dimana aktivitas politik, pers dan pernyataan masyarakat mulai dibatasi[1]. Sedangkan pada masa reformasi dengan tumbuhnya keterbukaan dalam komunikasi politik, masyarakat semakin tahu hak dan kewajibannya, bahkan aksi-aksi protes sebagai sebuah masukan (input) kedalam sistem politik menjadi sebuah hal yang tak aneh.

Pada masa sekarang dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui asas desentralisasi[2]. Konsep otonomi daerah tersebut salah satunya meliputi pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial suatu bangsa.

Bagi pemerintah daerah Sumatera Barat, salah satu peluang desentralisasi yang diberikan melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah direspon melalui Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Nagari adalah kesatuan

---

[1] http://freejournalist.wordpress.com/2007/01/06/komunikasi-politik-orde-reformasi/ diakses tanggal 24 oktober 2007.

[2] Syaukani, dkk, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 5.

BAB VI

KESIMPULAN

Komunikasi politik di lapau yang terjadi pada tingkat bawah, merupakan gambaran wujud politik real (nyata) yang terjadi didalam masyarakat dengan adanya kebebasan dalam berpolitik dan mengemukakan aspirasi politik masing-masing individu melalui pikiran-pikiran politik yang dikemukakan. Komunikasi politik di lapau merupakan bentuk partispasi politik yang aktif sedangkan komunikasi politik melalui media massa sifatnya relatif pasif.

Komunikasi politik di lapau merupakan komunikasi politik yang terjadi pada tingkat bawah, tergolong komunikasi politik pada tahap tradisonal dan komunikasi politik pada tahap moderen (campuran). Karakteristik komunikasi pada tahap tradisional adalah proses komunikasi tidak dibedakan secara tajam dengan proses-proses sosial lainnya, hirarki sosial menentukan aliran kandungan informasi, sehingga memperkuat kepentingan-kepntingannya sendiri, dan pada tahap ini jarang terdapat komunikator-komunikator profesional seperti komunikasi politik di lapau, sedangkan komunikasi politik pada tahap moderen adalah komunikasi-komunikasi media massa terprofesionalisasi dan relatif independen terhadap pemerintah, maka penggolongan komunikasi politik di lapau sebagai komunikasi pada tahap

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Teori

Anwar Arifin. 1998. *Ilmu Komunikasi: Sebagai Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dan Nimmo. 2004. *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan Dan Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Hafied Cangara. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Kamto Prawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Pengantar*. Surabaya: Sinar Baru Algetindo.

LIPI Pusat Penelitian Ilmu Politik. 2005. *Konflik antara relit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Michael Rush dan Phillip Althoff. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

Mochtar Mas'oed dan Collin Mac Andrews. 1991. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nuruddin. 2001. *Komunikasi Propaganda*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Reed H. Blake, Edwin O. 2005. Haroldsen. *Taksonomi Konsep Komunikasi*. Surabaya: Papyrus.

Sastroadmodjo, Sudijono. 1995, *Perilaku Politik*. Semarang; IKIP Semarang Press.

Sumano Ap. 1989. *Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sumarno. Ap. 1990. *Pendapat Umum Dalam Sistem Politik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Syaukani, dkk. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

T.B. Bottomore. 2006. *Elite dan Masyrakat*. Jakarta: Akbar Tandjung Institute.

Zulkarnaen, Nasution. 1990. *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.